

TAJUK RENCANA

Polemik Cincin Kawin Sandra Dewi

ADA hal menarik ketika artis Sandra Dewi menjadi saksi untuk terdakwa suaminya, Harvey Moeis, dalam kasus korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat ditanya hakim ketua tentang barang bukti emas yang diberikan suaminya, Sandra Dewi mengaku hanya berupa cincin kawin dan cincin pertunangan. Ketika dikejar pertanyaan apakah barang itu masih ada, Sandra Dewi menjawab masih ada dan ketika hendak diminta penyidik tak diberikan (KR 12/10).

Itulah yang kemudian mengundang reaksi Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, ada kesan seolah-olah Kejagung tidak profesional dalam melakukan penyidikan, termasuk dalam hal penyitaan barang. Padahal, dalam proses penyidikan, penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, itu hal biasa. Apalagi, terkait dengan kasus Harvey Moeis, ada dugaan Sandra Dewi menerima aliran dana Rp 3,15 miliar di rekeningnya yang ditransfer melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin pada tahun 2018-2023.

Kita melihat kasus tersebut murni hukum, termasuk ketika penyidik hendak melakukan penyitaan cincin emas Sandra Dewi. Setiap penyitaan barang tentu ada pertanggungjawaban hukumnya. Barang akan disita ketika ada dugaan kuat berhubungan dengan suatu tindak pidana. Apakah cincin kawin maupun cincin pertunangan Sandra Dewi ada keterkaitan dengan tindak pidana ?

Penyidik tentu memiliki dasar hukum yang kuat sehingga perlu melakukan penyitaan. Misalnya menyangkut tempus delicti atau waktu peristiwa pidana itu terjadi, kapan ? Adakah keterkaitan waktu antara peristiwa pidana yang di tuduhkan kepada Harvey Moeis dengan pemberian cincin emas tersebut ? Kalau kemudian terbukti tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana, maka barang sitaan tersebut akan dikembalikan kepa-

da pemiliknya. Itulah mekanisme kerja hukum pidana yang selalu ada standarnya.

Mengapa Sandra Dewi kemudian terseret-seret dalam kasus yang membelit sang suami ? Boleh jadi, Sandra Dewi tidak terlibat langsung dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022 yang suaminya Harvey Moeis menjadi terdakwa. Namun ada dugaan aliran uang ke dirinya yang merupakan hasil korupsi. Untuk itulah Kejagung sedang melacak ke mana saja aliran uang hasil korupsi Harvey Moeis yang nilainya sangat fantastis mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam beberapa kasus korupsi, apalagi nilainya sangat besar, ter-sangka biasanya menyembunyi-kan hasil kejahatannya agar tidak terendus petugas. Tindakan untuk mengaburkan hasil kejahatan inilah yang sering kita kenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Caranya antara lain dengan mengalihkan ke pihak lain, baik itu ke istri, kerabat atau pihak lainnya yang seolah-olah harta tersebut diperoleh secara halal.

Dalam konteks itulah kita memahami mengapa penyidik Kejaksaan Agung menelusuri harta kekayaan Sandra Dewi untuk memeriksa adakah keterkaitan dengan tindak pidana korupsi sang suami. Bila ada dugaan kuat harta tersebut berhubungan dengan tindak pidana, maka penyidik berwenang melakukan penyitaan. Berikutnya, bila tidak terbukti ada keterkaitan dengan tindak pidana, maka barang yang disita dikembalikan kepada si pemilik.

Hal penting yang perlu menjadi perhatian, apakah Sandra Dewi menduga atau patut menduga bahwa harta yang diperoleh dari suaminya berasal dari kegiatan yang halal, bukan korupsi ? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa konsekuensi hukum. Kita tunggu saja hasil penyidikan tuntas penegak hukum. □-d

Cendekiawan Kritis, Masihkah Diperlukan?

KAMAL Firdaus, seorang pengacara senior, pada *èwalli Facebook*-nya beberapa waktu lalu menulis, 'Prof. Dr. Bertambah Terus, Tapi Cendekiawan Semakin Langka.' Kegundahan Kamal Firdaus tersebut didasari kenyataan, saat ini semakin langka penyangdang gelar profesor doktor yang layak disebut cendekiawan. Tepatnya, cendekiawan kritis, yaitu cendekiawan yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Berani membela dan memperjuangkan rakyat yang terpinggirkan dalam segala sendi kehidupan. Apapun risikonya. Meminjam istilah Dick Hartoko, kaum cendekiawan jenis ini adalah mereka yang berumah di angin.

Berdasarkan data yang ada, sampai akhir 2022 Indonesia sudah memiliki 63.315 doktor berbagai bidang ilmu, lulusan dalam dan luar negeri. Rasionya dibanding jumlah penduduk hanya 0,023 persen. Terbilang sangat rendah. Kalah dibanding Malaysia, atau bahkan, Vietnam. Apalagi bila dibandingkan dengan AS, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Berdasar catatan Kemenristekdikti (2017), di Indonesia per satu juta penduduk hanya ada 143 doktor. Sementara di Malaysia per satu juta penduduk ada 509 doktor, AS (9.850), dan Jerman (3.990). Dan dari 63.315 doktor Indonesia (2023), yang sudah profesor ada 8.118. Tentu saja angka-angka tersebut saat ini sudah berubah secara signifikan.

Pembelajar Abadi

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *ècendekiawan* dimaknai sebagai: (1) orang cerdas pandai, orang intelek; (2) orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.

Baik mengacu pada pernyataan Kamal Firdaus maupun KBBI, dapat disimpulkan bahwa tidak semua profesor doktor layak disebut cendekiawan. Juga, untuk menjadi seorang cendekiawan tidak harus bergelar profesor doktor. Ada beberapa cendekiawan yang hanya tamatan master, S-1, sarjana muda, SLTA, atau bahkan SLTP. Yang

Sarworo Soeprapto

penting, orang bersangkutan memenuhi kriteria memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya dalam memahami sesuatu, dan berani bersikap kritis. Ditambah lagi, memiliki integritas tinggi.

Dalam kenyataan, di antara penyangdang profesor doktor, hanya sedikit yang layak disebut cendekiawan. Sebaliknya, ada beberapa tokoh bukan profesor doktor yang layak disebut cendekiawan. Misalnya Ajip Rosidi, Mochtar Lubis, Dick Hartoko, Soedjatmoko,



KR-JOKO SANTOSO

Gus Dur, YB Mangunwijaya (semua sudah almarhum), dan Goenawan Mohamad. Tokoh-tokoh tersebut bukan profesor doktor, tetapi kecendekiawanannya sejajar Prof Dr Umar Kayam (alm), ataupun profesor doktor lainnya. Sayangnya, tokoh bukan penyangdang profesor doktor yang berhasil menjadi cendekiawan, makin lama makin sedikit.

Pengakuan Publik

Seseorang disebut cendekiawan berkat pengakuan masyarakatnya. Publiklah yang mengakui seseorang sebagai cendekiawan. Pengakuan itu bukan dari institusi pendidikan maupun birokrasi pemerintahan. Pengakuan tersebut juga tidak tertulis, tetapi nyata adanya.

Banyak profesor doktor kurang layak disebut cendekiawan karena mereka hanya suntuk di bidang keilmuannya. Mereka pintar dan ahli sebatas ilmunya. Mereka kurang mampu mengaitkan ilmu yang ditekuni dengan kenyataan faktual masyarakatnya. Akibatnya, mereka abai terhadap ketimpangan-ketimpangan di lingkungannya. Sebaliknya, cendekiawan, walaupun tidak bergelar profesor doktor, berani bersuara kritis bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres di masyarakatnya.

Apakah seorang cendekiawan harus kritis? Itu pasti. Kalau tidak kritis, berarti mereka tidak layak disebut cendekiawan. Contoh cendekiawan kritis

antara lain Faisal Basri (alm) dari UI. Almarhum semasa hidupnya berani mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah, berdasarkan fakta dan data. Walaupun bukan penyangdang profesor doktor, Faisal Basri adalah cendekiawan sejati.

Di era yang penuh disruptif, apakah kehadiran cendekiawan masih diperlukan? Apakah suara kritis cendekiawan masih didengarkan? Kini, suara kritis cendekiawan pasti akan langsung dilawan habis-habisan oleh para pendengung (*buzzer*) penguasa yang kadar *èkeilmuan*-nya tak jelas. Namun, seperti halnya pers saat ini yang perannya makin tersisih sebagai salah satu pilar demokrasi, kehadiran cendekiawan tetap diperlukan. Bersama-sama pers, cendekiawan dan *podcast-podcast* kritis, harus tetap dijadikan pilar keempat demokrasi. Kapanpun, kelompok kritis tetap diperlukan, sebab kekuasaan di manapun selalu cenderung korup. Jadi harus selalu dikritisi. □-d

*) Sarworo Soeprapto, peminat masalah sosial dan kebudayaan.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Semarak Kota Geblek

TANGGAL 15 Oktober ini Kabupaten Kulonprogo genap memasuki usia ke 73. Jika menilik sejarah, berdirinya Kabupaten Kulonprogo tak lepas dari bersatunya dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningriat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman yang ditandai dengan diundangkannya UU No 18 tahun 1951 pada tanggal 15 Oktober 1951.

Mengusung tema Semarak Kota Geblek yang merupakan akronim dari iSejahtera Maju Mandiri Berbudaya dan Berkelanjutan, Kolaborasi Tangguh, Greget Bersinergi Luas untuk Ekonomi Inklusi perayaan hari jadi tahun ini tampak lebih meriah. Tema hari jadi tersebut sesuai visi Kabupaten Kulonprogo dalam RPJPD tahun 2025-2045, yaitu Masyarakat Kabupaten Kulonprogo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK) serta tema indikator pembangunan nasional tahun 2025, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Saat ini

Di usia ke-73, banyak prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Kulonprogo, antara lain : Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil, Kabupaten Layak Anak tingkat Madya, Penghargaan Swasti Saba Padapa Kabupaten Sehat, Anugerah Kalpataru dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kategori A serta Indeks Reformasi Birokrasi kategori A.

Kulonprogo juga masih memiliki tantangan besar dalam bidang pembangunan, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan dan stunting serta pemerataan ekonomi. Dari catatan statistik, pertumbuhan ekonomi Kulonprogo pernah mencapai 13,49% pada tahun 2019 karena ditopang sektor konstruksi pembangunan bandara YIA, namun di tahun 2023 tercatat hanya di angka 5,65% yang disumbang paling besar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian untuk tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tiga tahun

Nur Afan Dwi Saputro

terakhir, namun masih berada di angka 15,62 % di tahun 2024.

Paradoks dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya, indeks angka harapan hidup masyarakat Kulonprogo terus mengalami peningkatan dan berada paling tinggi di DIY, yaitu di angka 75,35 pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 70,17 untuk laki-laki dan 74,18 untuk perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kulonprogo juga terus mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir dan berada pada angka 75,82 di tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 74,39.

Potensi ke Depan

Kabupaten Kulonprogo memiliki potensi besar berupa karunia alam yang bisa dioptimalkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Setidaknya ada empat kawasan pertumbuhan yang bisa menjadi fokus pembangunan, antara lain, Kawasan Pantai Selatan, Kawasan Aerotroolis Bandara YIA termasuk kota Wates, Kawasan Perbukitan Menoreh dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Selain itu

Kulonprogo juga telah memiliki 26 Desa Wisata yang juga bisa menjadi penyokong pertumbuhan melalui sektor pariwisata.

Kawasan pantai selatan dari Pantai Trisik sampai Congot tidak hanya memiliki potensi wisata, namun juga potensi pertanian seperti cabe, bawang merah dan sayuran yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di sana. Pantai selatan juga mempunyai potensi perikanan yang sangat besar. Kemudian potensi wisata perbukitan menoreh yang cukup eksotis seperti, glamping Menoreh, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Puncak Widosari, ekowisata Sungai Mudal dan wisata parala yang di Girisembung Banjar-

asri Kalibawang juga bisa dikembangkan menjadi paket wisata menarik yang *dibundling* dengan perhotelan yang ada. Selain itu Kulonprogo juga perlu memperbanyak *event-event* berskala nasional atau internasional yang diadakan secara reguler sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat secara luas.

Perkembangan Kulonprogo ke depan juga bergantung dari kepala daerah yang akan terpilih pada perhelatan pilkada November nanti. Harapannya kepala daerah yang terpilih memiliki sifat altruistik karena mengutamakan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Lebih dari itu kepala daerah terpilih harus mampu menarik sebanyak-banyaknya investor baik di sektor industri manufaktur, pendidikan, kesehatan dan pariwisata agar terwujud penciptaan lapangan kerja bagi anak muda dan juga kebijakan politik yang diambil dapat menimbulkan *trickle down effect* yang berdampak pada masyarakat luas.

Selamat hari jadi Kulonprogo semoga bisa terus menjadi 'Permata Jawa'. □-d

*) Nur Afan Dwi Saputro STP MM, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Kulon Progo 2024-2026 dan Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wates.

Pojok KR

Para hakim tunggu janji pemerintah baiki kesejahteraan.

-- Berdampak pula terhadap pencari keadilan.

Kemenag tegaskan tak ada larangan nikah di hari libur.

-- Yang penting tercatat, bukan di bawah tangan.

Polri siagakan 15.000 personel amakan pelantikan presiden.

-- Berharap lancar tanpa hambatan apapun

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.